

## PERANAN KABUPATEN WAY KANAN DALAM PEMBENTUKAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROPINSI LAMPUNG TAHUN 1999 – 2002

Agus Tri Basuki

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
agustribasuki@yahoo.com

### Abstract

*The objective of this paper is to observe the role of economic development of the Way Kanan District (Kabupaten) in developing the Province of Lampung. The paper concludes that the contribution of the Kabupaten gross regional domestic product (GRDP) of Way Kanan to the Lampung Provincial GRDP in average was about 0.87, while the average rate of growth of the Kabupaten GRDP was 2.1. In addition, the Way Kanan Kabupaten GRDP contribution was approximately 3.39% of the total provincial GRDP. The Way Kanan is the youngest district in the province; therefore it is reasonable that Kabupaten GRDP has not yet significantly contributed to the Lampung Provincial GRDP.*

*Keywords : PDRB, Otonomi daerah*

### PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian dunia berlangsung dengan cepat dan bersifat global, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Lajunya perkembangan perekonomian Indonesia sampai dengan tahun 1996 sebelum krisis ekonomi yang melanda Indonesia cukup baik, hal ini disebabkan karena dampak positif dari globalisasi serta adanya iklim yang menarik bagi pertumbuhan dunia usaha di dalam negeri sebagai dampak dari berbagai kebijakan deregulasi dan hal ini tercermin dalam APBN dimana penerimaan dan kegiatan pembangunan

setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Pada tanggal 1 Januari 2001 pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan otonomi daerah di setiap kotamadya maupun kabupaten di seluruh propinsi. Dengan diberlakukan otonomi daerah ini diharapkan terjadi pembangunan ekonomi yang lebih baik serta terjadi keadilan dalam hal pemerataan pembangunan.

Untuk membangun suatu daerah diperlukan dukungan finansial dan potensi daerah yang dimiliki. Tidak berarti bahwa daerah yang tidak memiliki potensi sumberdaya akan mengendur kegiatan pembangunan dan

ekonominya. Hanya saja daerah yang miskin harus menyesuaikan diri untuk mengoptimalkan potensi non-natural resources. Sebagai contoh, suatu kabupaten bisa memunculkan orientasi baru pembangunannya, seperti mengembangkan diri sebagai daerah industri, pusat perdagangan, pariwisata, atau mengembangkan industri jasa tertentu yang sesuai dengan potensi lokal.

Untuk mendukung pembangunan daerah dibutuhkan adanya investasi yang lebih banyak, baik berasal pemerintah daerah sendiri maupun dari

Sejak tahun 2000 dan 2001 perkembangan ekonomi Propinsi Lampung dan kabupaten Way Kanan dapat kita lihat pada table 1. Pada tahun 2001 perkembangan ekonomi Propinsi Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 4,71 persen dibandingkan dengan tahun 2000. Dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian (54,7 persen), kemudian disusul oleh listrik, gas dan air bersih (14,6 persen), sedangkan kontribusi tertinggi dicapai oleh sektor pertanian. Sedangkan pada

**Tabel 1**  
PDRB Propinsi Lampung dan Kabupaten Way Kanan menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993, tahun 2000-2001

Lapangan Usaha	Propinsi Lampung			Kabupaten Way Kanan		
	2000	2001	%	2000	2001	%
1. Pertanian	2623104	2695829	2.77	112095	114557	2.19
2. Pertambangan dan Penggalian	173993	269225	54.73	6254	6488	3.74
3. Industri Pengolahan	982271	1016569	3.49	16648	17120	2.83
4. Listrik, gas dan Air bersih	76226	87360	14.60	697	729	4.59
5. Bangunan	526797	554693	5.29	17416	18277	4.94
6. Perdagangan, restoran dan hotel	1102315	1110729	0.76	24159	24727	2.35
7. Angkutan dan Komunikasi	668054	691572	3.52	9953	12030	20.86
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	382152	388877	1.75	15795	17427	10.33
9. Jasa-jasa	639342	698005	9.17	22275	22372	0.43
PDRB	7174254	7512859	4.71	225292	233727	3.74

Sumber : Propinsi Lampung dan Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2003

pihak swasta. Hal demikian akan dapat terjadi jika daerah bersifat proaktif menarik investor, baik dengan memberikan insentif tertentu, ataupun melalui penyediaan infrastruktur yang membuat pemilik dana mau menginvestasikan modalnya. Dengan majunya kegiatan ekonomi daerah bukan saja akan menambah potensi pemasukan pajak, retribusi dan sebagainya, melainkan juga semakin terbukanya lapangan pekerjaan.

tahun 2001 perkembangan ekonomi Kabupaten Way Kanan yang merupakan kabupaten termuda di Propinsi Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 3,74 persen dibandingkan dengan tahun 2000. Dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Angkutan dan Komunikasi (20,8 persen), kemudian disusul oleh Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (10,3 persen), sedangkan kontribusi tertinggi dicapai oleh sektor pertanian. Jika kita lihat pertumbuhan ekonomi antara Propinsi Lampung dan

Kabupaten Way Kanan tidak begitu berbeda, tetapi yang membedakan adalah pertumbuhan ekonomi per sektor. Jika di Lampung pertumbuhan ekonomi tertinggi untuk sektor pertambangan, sedang untuk Kabupaten Way Kanan pada Sektor Transportasi. Sedangkan jika kita perhatikan kontribusi terbesar untuk Propinsi Lampung dan Kabupaten Way Kanan disumbangkan oleh sektor pertanian. Dari gambaran inilah yang menarik penulis untuk meneliti perkembangan Kabupaten Way Kanan terhadap Propinsi Lampung dengan judul : PERANAN KABUPATEN WAY KANAN DALAM PEMBENTUKAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROPINSI LAMPUNG. TAHUN 1999 – 2002.

## PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas pada latar belakang masalah maka dapat kita turunkan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Sejahterama peranan pembangunan kabupaten Way Kanan terhadap pembangunan Propinsi Lampung
2. Sejahterama perkembangan pembangunan Kabupaten Way Kanan

## MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui sejauhmana peranan pembangunan Kabupaten

Way Kanan terhadap pembangunan Propinsi Lampung.

2. Ingin mengetahui sejauhmana perkembangan pembangunan Kabupaten Way Kanan.

## TINJAUAN PUSTAKA

Tujuan otonomi daerah menurut Smith (1985) dalam Analisis CSIS yang dikemukakan oleh Syarif Hidayat dibedakan dari dua sisi kepentingan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari kepentingan ini Pemerintah Pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokrasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara bila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah ada tiga tujuan yaitu :

1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah.
2. Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
3. Untuk mewujudkan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi

pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

### 1. Konsep Otonomi Daerah

Ada dua wacana yang dapat diambil, pertama UU no. 5 tahun 1974 masih relevan hanya belum dilaksanakan secara konsisten, yang kemudian melahirkan kebijakan pemerintah berupa proyek percontohan otonomi di satu daerah tingkat II untuk masing-masing propinsi. Kedua, UU No 5 tahun 1974 sudah diganti sama sekali karena sistem ini dinilai menghambat proses demokratisasi pemerintahan.

Sebagai bangsa yang berubah, kita harus berani mengubah pola hubungan pusat dan daerah yang paternalistik dan sentralistik menjadi pola hubungan yang bersifat kemitraan dan desentralistik. Inilah yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 dan UU No 25 tahun 1999. Dengan dua undang-undang ini diharapkan dapat meninggalkan paradigma pembangunan yang sebagai acuan kerja pemerintahan. Artinya tidak ada lagi kebijakan pembangunan yang mengandung nilai ketidakadilan dan bersifat mematikan kreatifitas pemerintahan daerah. Perubahan paradigma ini dianggap sebagai suatu gerakan kembali ke karakter pemerintahan yang hakiki. Tujuan utama dikeluarkannya kedua undang-undang tersebut diatas yaitu di satu pihak membebaskan pemerintahan pusat dari berbagai macam persoalan yang tidak perlu mengenai urusan domestik, sehingga pemerintah pusat cukup mengurus kebijakan makro ekonomi yang bersifat strategis.

Dalam rangka otonomi daerah diperlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintahan pusat, dengan keleluasaan merumuskan kebijakan pemerintah daerah. Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup, yaitu :

1. Di bidang politik, otonomi daerah merupakan buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, sehingga dapat dipahami sebagai sebuah proses mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.
2. Di bidang ekonomi, terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
3. Di bidang sosial dan budaya, otonomi harus dapat dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara dinamika kehidupan di sekitarnya.

Berdasarkan visi ini, maka konsep otonomi daerah yang kemudian melandasi lahirnya UU No. 22 tahun 1999 dan UU tahun 1999, merangkum hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah.
- b. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah.
- c. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur

setempat demi menjamin tampilnya pemerintahan yang berkualitas tinggi.

- d. Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi.
- e. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah.
- f. Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat pengaturan sumber-sumber pendapatan daerah.
- g. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya-upaya memelihara harmoni sosial sebagai suatu bangsa.

Menurut Syaukani, Gaffar dan Rasyid (2002: 185-188) ada beberapa ciri khas yang menonjol dari UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, yaitu antara lain :

- Demokrasi dan demokratisasi, diperlihatkan dalam dua hal utama yaitu rekrutmen pejabat pemerintah daerah dalam proses legitasi daerah.
- Mendekatkan pemerintah dengan rakyat, titik berat otonomi daerah diletakkan kepada daerah kabupaten dan kota, bukan kepada propinsi.
- Sistem otonomi luas dan nyata, dengan sistem ini pemerintah daerah berwenang untuk melakukan apa saja yang

menyangkut penelenggaraan pemerintah.

- Tidak menggunakan sistem otonomi bertingkat.
- No mandate without funding, UU Pemerintah Daerah No 22 tahun 1999 yang kemudian ditegaskan dengan jelas dalam UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Sementara itu, Diratanayian (1984) mengatakan bahwa otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan dan ekonomi yang baik. Artinya pemerintah daerah semakin kreatif dan inovatif dalam mengambil sumber-sumber keuangan daerahnya sehingga tidak tergantung kepada pemerintah pusat.

## 2. Hakekat dan Manfaat Otonomi Daerah

Secara konseptual, Otonomi Daerah sebagaimana dijanjikan dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan optimisme bagi pengembangan masyarakat baru dan negara Indonesia Baru. Apa yang disebut dengan kemamdirian pemerintah daerah dalam menyelenggarakan rumah tangganya, tampak dengan jelas dalam batasan kewenangan berikut : "Kewenangan daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sensiri berdasar aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan". (Ps. 1:h). Adapun kewenangan daerah yang dimaksud dalam UU ini mencakup kewenangan seluruh bidang

pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain (Ps. &:1). Untuk mendukung implementasi dari UU tersebut, pemerintah bersama DPR juga telah mengeluarkan UU no 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hakikat dari UU terakhir ini adalah memberi basis ekonomi yang diperlukan bagi suatu pemerintah daerah di dalam mengatur rumah tangganya. Adanya perincian yang eksplisit mengenai hak-hak daerah dalam pembagian pendapatan dengan pemerintah pusat, bukan hanya memberikan political leverage kepada daerah, melainkan juga memperkuat hak politik daerah untuk menentukan arah pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimilikinya. Menurut kedua UU tersebut terutama UU no 25/1999 Pemerintah daerah memiliki sumber-sumber penerimaan bagi pelaksanaan desentralisasi : Pendapatan asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan. (Ps.3).

Ada beberapa implikasi positif seandainya kedua UU di atas diimplementasikan secara konsisten (Indria Samego, 2002) :

*Pertama*, jika otonomi daerah dilakukan, akan memberi ruang lebih longgar kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri.

*Kedua*, implementasi otonomi daerah yang baru mempunyai implikasi positif terhadap pembagian beban atas persoalan negara-bangsa yang

sekarang dihadapi pemerintah pusat. Dengan desentralisasi pemerintahan, akan berimbas pula pada desentralisasi masalah.

*Ketiga*, redistribusi pendapatan secara lebih adil dan transparansi merupakan hasil dari pelaksanaan otonomi daerah. Selama ini, daerah hanya mendapatkan bagian jauh lebih kecil dibanding pemerintah pusat.

*Keempat*, pelaksanaan kedua UU ini akan meningkatkan kemandirian dalam menyelenggarakan pembangunan.

*Kelima*, memperbanyak pasar dalam arti yang sesungguhnya. Jika kita bicara tentang pasar, yang terjadi bukanlah hanya pertemuan antara penjual dan pembeli secara fair dan transparan. Karena pembangunan yang berlangsung selama ini sangat sentralistik sifatnya, kepentingan negara dan aparturnya menjadi cukup dominan. Oleh karena itu tidak terlalu berlebihan bila fenomena monopolistik dan oligopolistik yang berkembang. Pada gilirannya kepentingan orang Jakarta lebih menonjol dibandingkan orang daerah.

*Keenam*, mempertebal tanggung jawab dan akuntabilitas publik terhadap rakyat daerah merupakan dampak positif lain dari otonomi daerah. Salah satu persoalan yang menonjol sekarang ini adalah pelayanan publik.

*Ketujuh*, otonomi daerah yang dilaksanakan sepenuh hati akan meningkatkan semangat kompetisi yang memang diperlukan dalam era globalisasi pasar sekarang.

Deangan adanya otonomi daerah, suasana berkompetensi semakin terbuka.

### 3. Implementasi Otonomi Daerah

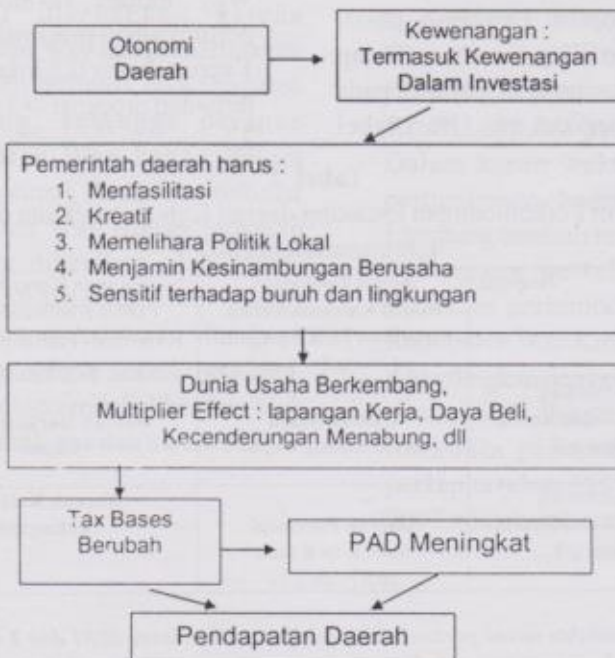
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, sektor pendapatan daerah menjadi peranan penting, dengan melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangga. Kondisi yang ditemui dalam implementasi otonomi daerah

pada masing-masing daerah tidak sama, karena menyangkut tersedianya sumber, tingkat kemajuan serta kemampuan sumber-sumber yang ada. Dari uraian diatas ada beberapa masalah umum yang akan dikemukakan disini menyangkut sejauh mana sumber-sumber pendapatan daerah yang tersedia dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah.

Hubungan antara otonomi daerah dengan pembangunan daerah dapat diungkapkan dalam diagram berikut ini:

Gambar 1

Hubungan antara otonomi daerah dengan pembangunan daerah



Sumber : Syaikani, Gaffar, Rasyid, 2002

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini akan dibahas tentang kondisi perekonomian Kabupaten Way Kanan yang meliputi posisi perekonomian Kabupaten Way Kanan di Propinsi Lampung, Perkembangan Ekonomi kabupaten Way Kanan, Analisis Location Quation, Analisis Shift share serta perubahan struktur ekonomi kabupaten Way Kanan.

1. Posisi Perekonomian Kabupaten Way Kanan di Propinsi Lampung  
Struktur ekonomi dan struktur sosial tiap daerah kabupaten dan kota berbeda satu sama lain yang didasarkan pada Typology Klassen. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB dan kontribusi Kabupaten Way Kanan dalam pembentukan PDRB Propinsi Lampung, posisi Kabupaten Way Kanan terhadap Propinsi Lampung ditunjukkan pada tabel 2. berikut ini. Dari tabel

dibawah ini terlihat bahwa sejak tahun 1999 hingga tahun 2002, Kabupaten Way Kanan masuk dalam kategori Daerah Potensial. Daerah ini adalah daerah yang relatif kuat mendorong aktivitas ekonomi di Propinsi Lampung, namun tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten Way Kanan lebih kecil dari tingkat pertumbuhan Propinsi Lampung. Salah satu penyebab mengapa daerah Kabupaten Way Kanan relatif terlambat adalah karena umur pemerintahan kabupaten) Way kanan yang relatif masih muda (didirikan pada tahun 1999), sehingga dapat dikatakan Kabupaten Way Kanan sedang menjalani transisi. Rerata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Way kanan terhadap rerata pertumbuhan propinsi Lampung < 1 atau sebesar 0,87 dan kontribusi terhadap propinsi > 1 atau sebesar 2,1.

**Tabel 2**

Ketimpangan Perkembangan Ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung tahun 2002

Proporsi Pertumbuhan	Rerata Kontribusi PDRB Kab/kota/Rerata Kontribusi PDRB propinsi ≥ 1	Rerata Kontribusi PDRB Kab/kota/Rerata Kontribusi PDRB propinsi ≤ 1
Rerata Pertumbuhan PDRB (kab/Kota)/Rerata PDRB Propinsi ≥ 1	<b>Daerah Maju Berkembang Cepat</b>	<b>Daerah Berkembang Cepat</b>
Rerata Pertumbuhan PDRB (kab/Kota)/Rerata PDRB propinsi ≤ 1	<b>Daerah Potensial Kab. Way Kanan (0,87 dan 2,1)</b>	<b>Daerah Relatif Tertinggal</b>

*Keterangan :*

1. Rerata kontribusi dan rerata pertumbuhan Kabupaten Way Kanan (0,87 dan 2,1) terhadap PDRB Propinsi Lampung berarti bahwa sejak tahun 1999 hingga tahun 2002, perbandingan tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten Way Kanan terhadap Propinsi sebesar 0,87 atau < 1 dan Perbandingan kontribusi Kabupaten Way Kanan dalam pembentukan PDRB Propinsi sebesar 2,1 atau > 1.

2. Sumber : Kantor Pusat statistik Kabupaten Way kanan (1999-2002), diolah



**Tabel 3**  
Kontribusi Kabupaten Way Kanan terhadap Propinsi Lampung  
1999-2002

Lapangan Usaha	1999	2000	2001	2002
1. Pertanian	4.09	4.27	4.25	4.92
2. Pertambangan dan Penggalian	3.86	3.59	2.41	2.04
3. Industri Pengolahan	1.72	1.69	1.68	1.87
4. Listrik, gas dan Air bersih	1.00	0.91	0.83	0.83
5. Bangunan	3.60	3.31	3.29	3.37
6. Perdagangan, restoran dan hotel	2.19	2.19	2.23	2.26
7. Angkutan dan Komunikasi	1.72	1.49	1.74	1.74
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4.05	4.13	4.48	4.56
9. Jasa-jasa	3.35	3.48	3.21	3.26
PDRB	3.14	3.14	3.11	3.39

Sumber : Kantor Pusat statistik Kabupaten Way kanan (1999-2002), diolah

Sedangkan jika kita perhatikan tabel 3. kontribusi Kabupaten Way Kanan terhadap Propinsi Lampung kurang lebih sebesar 3,39 persen dari PDRB kabupaten Lampung, hal ini disebabkan karena Kabupaten Way kanan merupakan kabupaten termuda di Kabupaten Lampung, sehingga peranan Kabupaten Way kanan belum begitu optimal. Kontribusi terbesar Kabupaten Way Kanan terhadap Lampung diberikan oleh sektor pertanian, diikuti oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaanserta sektor jasa-jasa. Kontribusi terendah diberikan oleh sektor listrik, gas dan air bersih.

## 2. Perkembangan Ekonomi Kabupaten Way Kanan.

Selama kurun waktu 2000-2002, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Way kanan rata-rata sebesar 3,19 % pertahun. PDRB Kabupaten Way Kanan meningkat dari Rp. 225.292 juta di tahun 2000 menjadi Rp. 262.851 Juta pada tahun 2002. Dalam kurun waktu yang sama pertumbuhan ekonomi di propinsi Lampung tumbuh rata-rata sebesar 3,7 persen pertahun. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Way Kanan lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Propinsi Lampung. Rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita tahun 1999 hingga tahun 2002 adalah sebesar 2 %.

**Tabel 4**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Way Kanan**  
**Atas Dasar Harga Konstan 1993, 1999-2002**

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	Rata-rata Pertrumbuhan	Rata-rata Kontribusi
1. Pertanian	112095	114557	138086	9.18	50.43
2. Pertambangan dan Penggalian	6254	6488	6286	0.81	2.65
3. Industri Pengolahan	16648	17120	17987	2.92	7.19
4. Listrik, gas dan Air bersih	697	729	808	6.64	0.31
5. Bangunan	17416	18277	19034	3.18	7.60
6. Perdagangan, restoran dan hotel	24159	24727	25718	2.73	10.36
7. Angkutan dan Komunikasi	9953	12030	13114	10.76	4.85
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	15795	17427	18792	6.69	7.21
9. Jasa-jasa	22275	22372	23026	3.19	9.41
PDRB	225292	233727	262851	6.59	100.00
Jumlah Penduduk	349.807	357.225	361.216		
Pendapatan Perkapita	621.834	630.673	647.056		

Sumber : Kantor Pusat statistik Kabupaten Way Kanan (1999-2002), diolah

Dilihat dari sektor usahanya, terlihat bahwa terdapat 3 sektor yang memiliki laju pertumbuhan di atas laju pertumbuhan rata-rata yaitu sektor Angkutan dan komunikasi, sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan Listrik, gas dan air bersih. Masing-masing sektor usaha ini pada kurun waktu yang sama berkembang rata-rata tumbuh sebesar 10,76 %, 6,69%, dan 6,64 % pertahun.

Dilihat dari kontribusi sektoral, terlihat bahwa sektor Pertanian masih memegang peranan dominan dalam mendukung pembentukan PDRB Kabupaten Way Kanan. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB selama kurun 1999 hingga tahun 2002 rata-rata sebesar 50,43 %. Sektor penyumbang PDRB kedua adalah Sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel rata-rata kontribusinya adalah

10,36 %. Sedangkan sektor dengan rata-rata kontribusi terendah disumbangkan oleh sektor Listrik, gas dan Air bersih serta sektor Pertambangan dan Penggalian dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,31 % dan 2,65 % pada kurun waktu yang sama.

- Analisis Location Quotient (LQ)  
 Location Quotient (LQ) merupakan alat analisis untuk mengetahui ada tidaknya spesialisasi suatu wilayah untuk sektor (industri) tertentu.

$$LQ = (E_{ij}/E_j)/(E_{in}/E_n)$$

Dimana,

$E_{ij}$  : Kesempatan kerja di sektor I di wilayah j

$E_j$  : Kesempatan kerja di wilayah j

$E_{in}$  : Kesempatan kerja di sektor I di negara n

$E_n$  : Kesempatan kerja di negara n

Interpretasi dari hasil perhitungan dengan formula tersebut adalah :

- Jika nilai  $LQ > 1$ , maka wilayah j untuk sektor I ada spesialisasi (Tingkat spesialisasi wilayah > tingkat spesialisasi nasional)
- Jika nilai  $LQ = 1$ , maka wilayah j untuk sektor I ada spesialisasi (Tingkat spesialisasi wilayah = tingkat spesialisasi nasional)
- Jika nilai  $LQ < 1$ , maka wilayah j untuk sektor I ada spesialisasi (Tingkat spesialisasi wilayah < tingkat spesialisasi nasional)

Dengan analisis LQ kita dapat menentukan sektor mana yang menjadi sektor basis dan sektor bukan basis dalam mendorong perekonomian di Kabupaten Way

memiliki sektor basis apabila nilai LQ kurang dari satu. Dengan menggunakan formula perhitungannya, terdapat beberapa sektor basis bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Way Kanan, yaitu : sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, sektor jasa. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, restoran dan hotel serta angkutan dan komunikasi bukan merupakan sektor basis.

#### 4. Typology Klassen

Dengan menggunakan penghitungan *Typology Klassen*, terlihat sebaran masing-masing sektor ditunjukkan dalam tabel 5.

**Tabel 5**  
Indeks Location Quotient (LQ) Kabupaten Way Kanan, 1999-2002

Lapangan Usaha	LQ				Rerata LQ
	1999	2000	2001	2002	
1. Pertanian	1.31	1.36	1.37	1.45	1.37
2. Pertambangan dan Penggalian	1.23	1.14	0.77	0.60	0.94
3. Industri Pengolahan	1.71	1.75	1.80	0.55	1.45
4. Listrik, gas dan Air bersih	0.37	0.31	0.28	0.25	0.30
5. Bangunan	1.33	1.11	1.11	0.99	1.14
6. Perdagangan, restoran dan hotel	0.70	0.70	0.72	0.67	0.69
7. Angkutan dan Komunikasi	0.64	0.50	0.59	0.51	0.56
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.50	1.39	1.51	1.34	1.44
9. Jasa-jasa	1.24	1.17	1.08	0.96	1.11

Sumber : Kantor Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan (1999-2002), diolah

Kanan. Untuk mengatakan bahwa suatu daerah memiliki basis di sektor tertentu apabila nilai LQ lebih besar dengan satu, dan sebaliknya suatu daerah tidak

Berdasarkan penghitungan *Typology Klassen* terlihat bahwa sub-sektor maju terdiri dari sektor pertanian. Sedangkan Sub Sektor Berkembang adalah sektor listrik,

gas dan air bersih, sektor angkutan, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan sub-sektor terbelakang terdiri dari sektor Pertambangan dan

digunakan untuk mendeskripsikan trend agregat secara statistik, shift-share analisis mengklarifikasikan perubahan PDRB setiap saat dalam wilayah yang

**Tabel 6**  
Klasen Typology Kabupaten Way Kanan, tahun 1999-2002

Proporsi	$\frac{X_i}{\bar{X}} \geq 1$	$\frac{X_i}{\bar{X}} \leq 1$
Pertumbuhan $\frac{\Delta X_i}{\Delta \bar{X}} \geq 1$	Sub Sektor maju Pertanian (1,39 dan 4,5)	Sub Sektor Berkembang Listrik, Gas dan air bersih (1,01 dan 0,03) Angkutan dan Komunikasi (1,63 dan 0,43) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (1,01 dan 0,65)
$\frac{\Delta X_i}{\Delta \bar{X}} \leq 1$	Sub sektor Potensial	Sub Sektor Terbelakang Pertambangan dan penggalian (0,12 dan 0,23) Industri Pengolahan (0,44 dan 0,6) Bangunan (0,48 dan 0,68) Perdagangan, restoran dan hotel (0,41 dan 0,93) Jasa-jasa (0,48 dan 0,85)

Sumber : Kantor Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan (1999-2002), diolah

penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Bangunan serta sektor Perdagangan, restoran dan hotel, serta sektor jasa.

##### 5. Analisis Shift-Share

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi tiap-tiap subsektor terhadap Pendapatan Domestik regional Bruto (PDRB). Analisis Shift-share dapat

diperbandingkan dengan tiga kategori, komponen dalam membentuk shift-share diantaranya adalah PDRB disektor tertentu (i) tingkat wilayah, laju pertumbuhan PDB tingkat nasional (rn), laju pertumbuhan PDB disektor tertentu (i) ditingkat nasional (rin), dan laju pertumbuhan PDRB di sektor tertentu (i) tingkat wilayah.

**Tabel 7**  
**Analisis Shift-Share Kabupaten Way Kanan, 2001-2002**

Lapangan Usaha	2001				2002			
	Nij	Mij	Cij	Dij	Nij	Mij	Cij	Dij
1. Pertanian	5406.77	-2316.39	-574.31	2516.07	4347.55	1044.92	892.30	6284.77
2. Pertambangan dan Penggalian	306.22	1988.76	-2052.22	242.76	197.91	589.99	-6.06	781.84
3. Industri Pengolahan	808.02	-230.41	-92.23	485.38	566.31	-1608.08	28.52	-1013.26
4. Listrik, gas dan Air bersih	34.41	58.50	-59.44	33.47	25.44	56.41	2.42	84.27
5. Bangunan	862.62	56.54	-15.60	903.57	599.27	-240.76	24.69	383.21
6. Perdagangan, restoran dan hotel	1167.05	-979.73	394.04	581.35	809.71	-171.90	32.33	670.14
7. Angkutan dan Komunikasi	567.78	-158.68	2101.33	2510.43	412.89	681.39	36.92	1131.19
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	822.51	-521.13	1499.25	1800.62	591.65	483.02	46.10	1120.77
9. Jasa-jasa	1055.90	824.33	-1782.81	97.42	724.96	-439.39	21.10	306.67
<b>PDRB</b>	<b>11031.27</b>	<b>-1278.20</b>	<b>-581.99</b>	<b>9171.08</b>	<b>8275.69</b>	<b>395.60</b>	<b>1078.31</b>	<b>9749.60</b>

Sumber : Kantor Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan (1999-2002), diolah

Keterangan :

- Nij : Pengaruh Pertumbuhan Propinsi
- Mij : Pengaruh Bauran Industri
- Cij : Pengaruh Keunggulan Kompetitif
- Dij : Analisis Shift-Share

Berdasarkan analisis shift-share pada tahun 2001 diketahui bahwa dari total Rp. 9.171,1 juta tambahan PDRB di Kabupaten Way Kanan, sebesar Rp. 11.031 juta disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan propinsi. Namun demikian, dampak dari ekonomii propinsi ini dikurangi dengan pengaruh bauran industri (*industrial mix*) sebesar Rp. 1.278 juta dan dikurangi dengan pengaruh keunggulan kompetitif daerah sebesar Rp. 582 juta. Besarnya pengaruh perkembangan sektor ekonomi eksternal dan bauran industri ini menunjukkan bahwa Kabupaten Way Kanan merupakan perekonomian yang sangat terbuka terhadap faktor-faktor eksternal yang terjadi di luar Kabupaten Way Kanan. Tapi sayangnya memasuki tahun 2001 telah terjadi penurunan keunggulan kompetitif daerah Kabupaten Way Kanan.

Sedangkan pada tahun 2001 diketahui bahwa dari total Rp. 9749.60 juta tambahan PDRB di Kabupaten Way Kanan, sebesar Rp. 8275.69 juta disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan propinsi. Dengan keterbukaan ekonomi kabupaten Way Kanan berdampak dari ekonomi propinsi ditambah dengan pengaruh bauran industri (*industrial mix*) sebesar Rp. 395,6 juta dan ditambah dengan pengaruh keunggulan kompetitif daerah sebesar Rp. 1078,31 juta.

Jadi jika kita bandingkan dengan tahun 2001, perekonomian kabupaten Way Kanan pada tahun 2003 mengalami peningkatan terutama keunggulan kompetitifnya mengalami perbaikan.

6. Analisis Perubahan Struktur  
Salah satu ciri terjadinya suatu pembangunan di suatu daerah

adalah terjadi perubahan peranan sektor pertanian terhadap PDRB ke peranan sektor industri terhadap PDRB, peranan pertanian mulai mengecil dibarengi dengan peningkatan peran sektor industri. Pertumbuhan ekonomi yang berlangsung selama tahun 1999 hingga tahun 2002 telah mengubah struktur ekonomi Kabupaten Way Kanan. Sektor primer (sektor pertanian dan pertambangan) yang pada tahun 1999 mendekati 64,2 persen share-nya dari PDRB kini berada di sekitar 58,2 persen pada

Transformasi struktural diatas mengandung ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi meningkat melebihi pertumbuhan penduduk.
2. Share sektor primer menurun.
3. Share sektor sekunder meningkat.
4. Share sektor tersier meningkat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis dan pembahasan diatas maka dapat kita simpulkan sebagai berikut :

- 1.a. Rerata kontribusi dan rerata pertumbuhan Kabupaten Way

**Tabel 8**  
Perubahan Struktur Ekonomi Kabupaten Way Kanan, 1999-2002.

Sektor	Nilai				Sumbangan Thd PDB			
	1999	2000	2001	2002	1999	2000	2001	2002
Primer	375659	452645	460699	465356	64.2	66.7	64.0	58.2
Sekunder	68451	78766	84395	96223	11.7	11.6	11.7	12.0
Tersier	140700	147505	174814	237835	24.1	21.7	24.3	29.8
<b>PDRB</b>	<b>584810</b>	<b>678916</b>	<b>719908</b>	<b>799414</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Kantor Pusat statistik Kabupaten Way Kanan (1999-2002), diolah

tahun 2002. Sementara sektor sekunder (Industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan) sharenya hanya 11,7 persen dari PDRB pada tahun 1999 share-nya menjadi 12 persen dari PDRB pada tahun 2002. Sedangkan untuk sektor tersier (Perdagangan, restoran dan hotel, Angkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa) share-nya sekitar 24,1 persen dari PDRB pada tahun 1999 share-nya menjadi 29,8 persen dari PDRB pada tahun 2002.

Kanan terhadap PDRB Propinsi Lampung 0,87 dan 2,1 ini berarti bahwa sejak tahun 1999 hingga tahun 2002, perbandingan tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten Way Kanan terhadap Propinsi sebesar 0,87 atau  $< 1$  dan Perbandingan kontribusi Kabupaten Way Kanan dalam pembentukan PDRB Propinsi sebesar 2,1 atau  $> 1$ .

- b. Kontribusi Kabupaten Way Kanan terhadap Propinsi Lampung kurang lebih sebesar 3,39 persen dari PDRB kabupaten Lampung. Hal ini disebabkan karena

Kabupaten Way Kanan merupakan kabupaten termuda di Kabupaten Lampung, sehingga peranan Kabupaten Way Kanan belum begitu optimal. Kontribusi terbesar Kabupaten Way Kanan terhadap Lampung diberikan oleh sektor pertanian, diikuti oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Kontribusi terendah diberikan oleh sektor listrik, gas dan air bersih.

2. a. Dilihat dari sektor usahanya, kabupaten Way Kanan memiliki 3 sektor yang memperoleh laju pertumbuhan di atas laju pertumbuhan rata-rata yaitu sektor Angkutan dan komunikasi, sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan Listrik, gas dan air bersih. Masing-masing sektor usaha ini pada kurun waktu yang sama berkembang rata-rata tumbuh sebesar 10,76 % , 6,69%, dan 6,64 % pertahun. Dilihat dari kontribusi sektoral, terlihat bahwa sektor Pertanian masih memegang peranan dominan dalam mendukung pembentukan PDRB Kabupaten Way Kanan. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB selama kurun 1999 hingga tahun 2002 rata-rata sebesar 50,43 %. Sektor penyumbang PDRB kedua adalah Sektor Perdagangan. Restoran dan Hotel rata-rata kontribusinya adalah 10,36 %. Sedangkan sektor dengan rata-rata kontribusi terendah disumbangkan oleh sektor Listrik, gas dan Air bersih serta sektor Pertambangan dan Penggalian dengan rata-rata

kontribusi sebesar 0,31 % dan 2,65 % pada kurun waktu yang sama.

- b. Sektor basis bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Way Kanan, yaitu : sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, sektor jasa.

Saran yang bisa kita ambil dari analisis dan pembahasan diatas adalah sebagai berikut :

1. Salah satu buah dari hasil diberlakukan otonomi daerah adalah pemekaran wilayah bagi Kabupaten Way Kanan. Walaupun Kabupaten Way Kanan merupakan Kabupaten termuda di Propinsi Lampung namun telah menyumbang sebesar 3,4 persen dari total PDRB kabupaten Lampung. Dan dilihat dari peranan sektor pertanian yang paling menentukan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Way Kanan, maka Kabupaten Way Kanan perlu untuk mengambil kebijakan ekonomi yang mengarah kepada pengembangan sektor pertanian modern, seperti alokasi lahan untuk perkebunan-perkebunan.
2. Karena Kabupaten Way Kanan memiliki daya tarik pariwisata yang sangat baik, terutama alamnya, maka pemerintah Kabupaten Way Kanan hendaknya juga memikirkan untuk pengembangan sektor pariwisata. Karena sektor ini akan dapat menampung banyak tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra Salam, *Otonomi Daerah dan Akuntabilitas Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah : Pengalaman Beberapa Daerah*. Jurnal Demokrasi & Ham, V0. 2, N0. 2, Juni-September 2002.
- Edy Suandi Hamid dan MB. Hendrie Anto, *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*, UII Press Yogyakarta, 2000.
- Hg. Suseno Triyanto Widodo, *Ekonomi Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1997.
- \_\_\_\_\_ , *Indikator Ekonomi*, Kanisius, Yogyakarta, 1990
- Indria Samego, *Masalah Good Governance di dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Jurnal Demokrasi & Ham, V0. 2, N0. 2, Juni-September 2002.
- M. Nazir, (1988), *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sritua Arief, (1993), *Metode Penelitian Ekonomi*, UI-PRESS, Jakarata.
- Kabupaten Way Kanan Dalam angka 2003
- Propinsi Lampung Dalam angka 2003
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penerimaan Daerah
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah.